

# **NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENGUKURAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026 SERTA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2027**

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Juni 2026

Waktu : 08.30 s.d Selesai

Tempat : Ruang Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

Peserta : Plt. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, serta Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

## **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka:

1. Melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026.
2. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
3. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026.
4. Membahas proyeksi pagu indikatif perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
5. Menyetujui pembagian pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan dan bidang pelaksana sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026**

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa seluruh bidang dan sekretariat agar melakukan pengukuran capaian kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 secara akurat, objektif, dan didukung data yang valid. Pengukuran kinerja

dilakukan terhadap indikator sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Masing-masing bidang diminta untuk:

1. melakukan verifikasi capaian indikator kinerja;
2. memastikan kesesuaian antara realisasi fisik, realisasi keuangan, dan capaian kinerja;
3. mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target;
4. menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II Tahun 2026;
5. menyiapkan data dukung untuk penyusunan laporan kinerja semester dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Disampaikan pula bahwa kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **B. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2027, rapat membahas proyeksi pagu indikatif perangkat daerah yang akan menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2027.

Proyeksi pagu indikatif tersebut mengacu pada Surat Bupati Bengkayang Nomor 000.7.2/55/BAPPERIDA-E tanggal 8 Juni 2026 perihal Penyampaian Pagu Indikatif Perangkat Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2027.

Pagu indikatif yang disampaikan merupakan gambaran awal kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2027 secara terukur, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027, seluruh bidang diminta memperhatikan:

- ✚ hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan Tahun 2026;

- + capaian indikator kinerja perangkat daerah;
- + isu strategis bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- + prioritas pembangunan daerah Tahun 2027;
- + target RPJMD Kabupaten Bengkayang;
- + kemampuan keuangan daerah;
- + prinsip money follows program dan penganggaran berbasis kinerja.

### III. HASIL PEMBAHASAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027

#### A. Belanja Pegawai

Rapat menyepakati alokasi Belanja Pegawai Tahun 2027 sebesar **Rp3.316.441.218,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS sebesar Rp2.284.886.202,00
2. Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp394.295.137,00
3. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar Rp612.749.883,00
4. BPJS Kesehatan 4% TPP ASN sebesar Rp24.509.996,00

**Total Rp3.316.441.218,00**

Belanja pegawai merupakan belanja wajib dan mengikat yang diprioritaskan untuk menjamin pemenuhan hak-hak ASN serta mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### B. Pagu Rutin RKPD Tahun 2027

Pagu rutin RKPD Tahun 2027 sebesar **Rp1.211.200.000,00** dibagi kepada masing-masing unit kerja sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebesar Rp548.051.708,00
2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebesar Rp225.462.177,00
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebesar Rp170.028.705,00
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp128.828.705,00
5. Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp138.828.705,00

**Total Rp1.211.200.000,00**

### **C. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pagu indikatif DAK Non Fisik sebesar **Rp408.000.000,00** dialokasikan sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp181.680.000,00
2. Bidang Perlindungan Anak Rp226.320.000,00

Total **Rp408.000.000,00**

Dana ini diprioritaskan untuk penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

### **D. Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit**

Pagu DBH Sawit Tahun 2027 sebesar **Rp433.246.190,00** dialokasikan kepada **Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial** untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan penggunaan DBH Sawit.

### **E. Belanja Mandatori, ADK dan Hibah**

Pagu sebesar **Rp134.025.180,00** dialokasikan sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sebesar **Rp120.000.000,00** untuk hibah kepada:

- ✚ Dharma Wanita Persatuan (DWP);
- ✚ Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
- ✚ Persatuan Istri Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang (PKB DPRD).

2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Sebesar **Rp14.025.180,00** untuk mendukung biaya perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) asal Kabupaten Bengkayang yang menjalani perawatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

#### IV. REKAPITULASI PAGU INDIKATIF TAHUN 2027

Sumber Pendanaan	Alokasi
Belanja Pegawai	Rp3.316.441.218,00
Pagu Rutin RKPD	Rp1.211.200.000,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp408.000.000,00
DBH Sawit	Rp433.246.190,00
Belanja Mandatori, ADK dan Hibah	Rp134.025.180,00
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2027</b>	<b>Rp5.502.912.588,00</b>

#### V. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pengukuran dan pelaporan kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 agar segera diselesaikan oleh seluruh bidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Hasil evaluasi kinerja Semester I Tahun 2026 menjadi bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2026.
3. Pagu indikatif Tahun 2027 sebagaimana telah dibahas dan disepakati menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2027.
4. Masing-masing bidang agar menyusun usulan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan anggaran sesuai pagu yang telah dialokasikan.
5. Seluruh perencanaan Tahun 2027 harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Bengkayang.

Rapat ditutup pada pukul 11.30 setelah seluruh peserta menyepakati hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026 dan pembagian proyeksi pagu indikatif sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027.

#### VI. ARAHAN KEPALA DINAS

Dalam arahnya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

## **1. Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan Hibah**

Kegiatan hibah yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan hibah perlu dipersiapkan dengan baik serta tetap dipertahankan dalam perencanaan tahun-tahun berikutnya sepanjang masih relevan dengan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peningkatan Kinerja Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial**

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial diharapkan tetap mempertahankan semangat kerja dan tidak menurunkan target kinerja yang telah ditetapkan. Target yang tinggi harus dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya hasil pembangunan yang lebih optimal di bidang kesejahteraan sosial.

## **3. Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Pelaksanaan Tugas**

Perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pemanfaatan AI dapat membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi penyusunan dokumen, mendukung analisis data, memperbaiki kualitas perencanaan, serta meningkatkan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan.

## **4. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Staf**

Seluruh pejabat struktural dan koordinator bidang agar terus memberdayakan, membimbing, dan meningkatkan kapasitas staf di lingkungan kerja masing-masing. Pelibatan staf dalam pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

## **5. Penguatan Peran Perencanaan dalam Evaluasi Kinerja**

Fungsi perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga harus mampu melakukan pengukuran, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala menjadi dasar dalam

menentukan efektivitas pelaksanaan program serta perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

#### **6. Peran Aktif Perencana dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pejabat dan staf yang melaksanakan fungsi perencanaan diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada masing-masing bidang terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Perencana harus mampu menganalisis tingkat keberhasilan suatu kegiatan, mengidentifikasi manfaat dan dampaknya, serta memberikan rekomendasi apakah kegiatan tersebut masih perlu dilanjutkan, disempurnakan, ditingkatkan, atau dihentikan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pembangunan daerah.

#### **7. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja dan Hasil**

Seluruh bidang agar membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, hasil, dan manfaat bagi masyarakat. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran perangkat daerah, indikator kinerja, serta tujuan pembangunan daerah sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan akuntabel.

Kepala Dinas menegaskan bahwa keberhasilan perangkat daerah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, seluruh aparatur diminta untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Mengetahui / Mengesahkan,

Pencatat / Notulis,

**dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M**

**FREDDY WILIAM LANTU, S.Sos**

## DOKUMENTASI

### Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 serta Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027

